

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.VII No.130 Kel. Timbau Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183,
Email: dishubkukar@yahoo.co.id
TENGGARONG – 75511



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja pada tahun 2021, guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah serta masyarakat pada umumnya.
Wassala'mualaikum, Wr. Wb.

Tenggarong, 22 Pebruari 2022

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ahmad Junaidi, S.Pd.,MM

Pembina TK.I

NIP. 19720224 199203 1 006

RINGKASAN LKjIP

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, yang dalam penyusunannya akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan akuntabilitas kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran sesuai RPJMD, yaitu: “Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan” mempunyai indikator kinerja, yaitu: Cakupan aksesibilitas antar wilayah. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100% target capaian sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.
2. Sasaran 1 Renstra, yaitu: “Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan”, diukur dengan 3 indikator, yaitu:
 - a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan target kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 80 telah dicapai realisasi kinerja sebesar 74,44, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 93 %, yaitu Belum mencapai target;
 - b. Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan tahun 2021 ditargetkan tercapai 100% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100%, maka capaian kinerja tercapai sesuai target.
 - c. Pada tahun 2021 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “77” atau dengan interpretasi “ Baik”. Kemudian dari hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 telah memperoleh nilai kepuasan sebesar 78,53 dengan mutu pelayanan B yang berarti bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan adalah BAIK.
3. Sasaran 2 Renstra, yaitu: “Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan”, diukur dengan 1 indikator, yaitu:
 - a. Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan. Berdasarkan target kinerja pada tahun 2021 ditargetkan tercapai 100% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerjanya tercapai melebihi target, yaitu sebesar 100% atau telah sesuai target;

4. Sasaran 3 Renstra, yaitu: “Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan”, diukur dengan 2 indikator, yaitu:
 - a. Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan. Berdasarkan target kinerja pada tahun 2021 ditargetkan tercapai 100% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 105%, dengan demikian capaian kinerjanya telah melebihi target, yaitu sebesar 100% atau telah tercapai sesuai target;
 - b. Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji. Berdasarkan target kinerja pada tahun 2021 ditargetkan tercapai 100% kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 61%, dengan demikian capaian kinerjanya tidak melebihi target, yaitu sebesar 61% atau belum mencapai target.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN LKjIP	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Penyusunan LKjIP	2
1.3. Profil Organisasi	4
1.3.1. Tugas dan Fungsi	4
1.3.2. Susunan Organisasi	4
1.4. Tujuan Penyusunan	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2021	9
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2021	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	19
3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021	19
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 dan Tahun 2021	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja	23

3.2.2	Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD	24
1.	<u>Indikator sesuai RPJMD</u> : “Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)”	24
3.2.3	Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra	25
1.	<u>Indikator 1</u> : “Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan”	25
2.	<u>Indikator 2</u> : “Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan”	27
3.	Indikator 3 : “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”	27
3.2.4	Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra	25
1.	<u>Indikator 1</u> : “Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan”	32
3.2.5	Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Renstra	33
1.	<u>Indikator 1</u> : “Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan”	33
2.	<u>Indikator 2</u> : “Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji”	35
3.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD	37
3.3.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)	37
3.3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset	40
3.3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan	41
3.4	Realisasi Anggaran SKPD	41
BAB IV.	PENUTUP	47
4.1.	Tinjauan Keberhasilan	47
4.2.	Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja	48
4.3.	Langkah-Langkah di Masa Mendatang	49

DAFTAR TABEL

	Hlm
<u>BAB II:</u>	
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2021	9
Tabel 2.2. Rincian Rencana Kinerja Tahun 2021	10
Tabel 2.3. Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2021	11
<u>BAB III :</u>	
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021	19
Tabel 3.2. Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 3.3. Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021	21
Tabel 3.5. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	30
Tabel 3.6. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	30
Tabel 3.7. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Keseluruhan Unit Pelayanan	31
Tabel. 3.8. Rincian Pendapatan Retribusi Sektor Perhubungan Tahun 2021	34
Tabel 3.9. Daftar penggunaan SDM/ Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021....	39
Tabel 3.10. Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2021	40
Tabel 3.11. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021	41
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2021	42
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	43

BAB IV:

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2021 47

DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

<u>BAB I:</u>	Hlm
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
- Lampiran 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Pegawai Tahun 2021
- Lampiran 5. Informasi Kinerja LKjIP Tahun 2021
- Lampiran 6. Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 7. Rencana Aksi Tahun 2022
- Lampiran 8. Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Kukar
- Lampiran 9. Jadwal Penyusunan LKjIP Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai kartanegara dewasa ini juga sangat ditentukan oleh peranan dari sektor transportasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas orang, barang dan jasa, mendukung pola distribusi regional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam konteks Renstra. Namun, banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang terealisasi melalui program dan kegiatan tersebut, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam penyusunannya akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Penyusunan LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 -2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;

22. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 550/1807/DISHUB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.
23. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 550/18/DISHUB/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021

1.3. Profil Organisasi

1.3.1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tugas Dinas Perhubungan adalah “melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan”.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut:

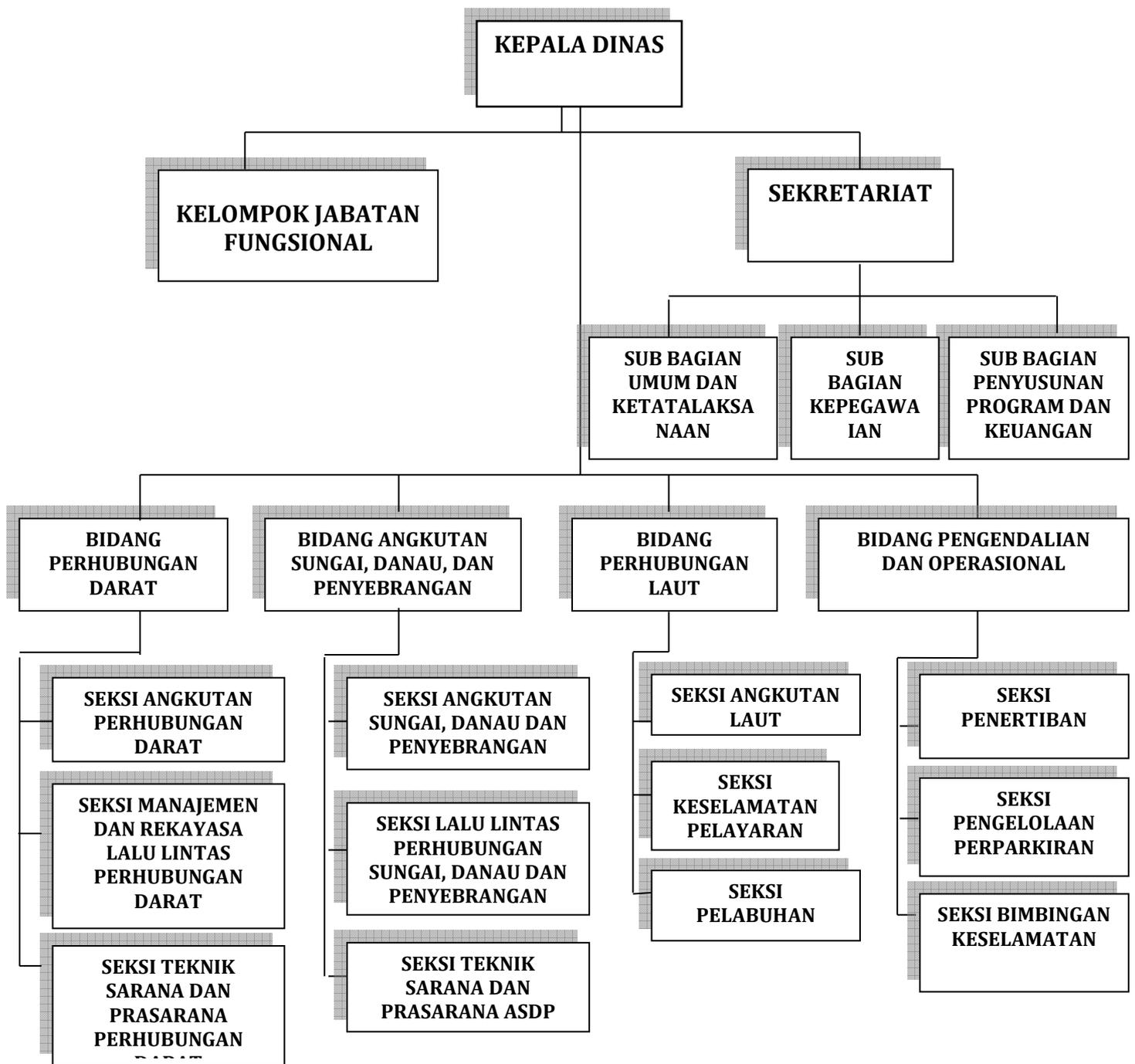
- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.3.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
- 1) Seksi Angkutan Perhubungan Darat;
 - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perhubungan Darat;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
- d. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, membawahkan :
- 1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
 - 2) Seksi Lalu Lintas Perhubungan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
- e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
- 1) Seksi Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Manajemen Keselamatan Pelayaran;
 - 3) Seksi Pelabuhan.
- f. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan
- 1) Seksi Penertiban;
 - 2) Seksi Pengelolaan Perparkiran;
 - 3) Seksi Bimbingan Keselamatan.
- g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

1.4. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, yaitu Bupati Kutai Kartanegara, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.4.2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5. Sistematika Penulisan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1.5.1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisikan: Kata Pengantar, Tim Penyusun, Ringkasan LKIP, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar/ Bagan, dan Daftar Lampiran.

1.5.2. Bagian Inti, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Dasar Penyusunan LKjIP, Profil Organisasi, Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Tabel Rencana Kinerja Tahun 2021, Tabel Rincian Rencana Kinerja, dan Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisikan capaian kinerja dari sasaran strategis. Menguraikan mengenai Analisis Capaian Kinerja melalui Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja masing-masing Sasaran. Kemudian menjelaskan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD. Kemudian menjelaskan mengenai Realisasi Anggaran SKPD, dan

Menjelaskan Prestasi atau Penghargaan yang telah diperoleh pada tahun 2021.

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan mengenai Tinjauan Keberhasilan, Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja, dan Langkah-Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatnya kinerjanya.

1.5.3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisikan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdasarkan perjanjian kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartabegara tahun 2021, maka sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun 2021, dibuatlah rencana Rencana kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target, sebagai berikut:

2.1. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja
(1)	(2)		(3)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>			
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>			
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80 (A)
	2	Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	100%
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 (Baik)
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>			
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1	Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	100%
	2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	100%

Kemudian secara lebih rinci mengenai rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.2
Rincian Rencana Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator sasaran	Formulasi	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>				
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1 Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Jumlah (kumulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%	94%	100%
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>				
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil penilaian (pertahun) oleh Inspektorat Kab. Kukar	67,10	80 (A)
	2 Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	Hasil dari Prosentase kegiatan yang ada di sasaran 1 Renstra di bagi jumlah program yang ada di sasaran Renstra 1 dikali 100%	85%	100%
	3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan dari Dinas Perhubungan	77,73	77 (Baik)
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%	89%	100%
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>				
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1 Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	Jumlah Pertahun Pendapatan Retribusi dibagi Target Pendapatan dikali 100 %	89%	100%

	2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	Jumlah Pertahun Kendaraan Yang diuji (Lulus Uji) dibagi Jumlah Kendaraan Wajib Uji dikali 100 %	90%	100%
--	---	---	---	-----	------

2.2. Rencana Anggaran Tahun 2021

Rencana anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENJA TAHUN 2021			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80 (A)	30.383.831.469,00
			2. Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	78%	
			3. Ideks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 (Baik)	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100	329.999.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	2 dokumen	200.000.000,00

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	129.999.800,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	13.827.665.593,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN	325 orang/bulan	13.533.205.593,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	Tenggarong	Jumlah ASN	10 orang/Bulan	194.460.000,00
	Kordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kukar	Jumlah Kegiatan	-	-
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.000.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100	149.290.000,00
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	149.290.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0,5	350.000.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah Dokumern	2 dokumen	50.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi	kukar	Jumlah Lokasi	5 Kecamatan	50.000.000,00

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kukar	Jumlah Tim peserta dan	20 orang	100.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah peserta	2 orang kegiatan	150.000.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.283.666.220,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	1 paket	32.217.000,00
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Barang ATK, Jumlah Kegiatan dan Jumlah ASN	1 paketi, 35 orang kali/kegiatan, 3570 kotak	386.538.220,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlahj dokumen Penggandaan	1 Paket, 15000 lembar, 2000 pak	131.120.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah ASN	35 orang/kali	560.591.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	1 kegiatan	98.100.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah website dan aplikasi	1 paket	75.100.000,00
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan pengadaan barang	100	-

	Pengadaan Mebel	Tenggar ong	Jumlah mebel yang di adakan	1 paket	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.807.003.2 56,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggar ong	Jumlah rekening tagihan	5 kegiatan	9.165.911.60 8,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggar ong	Terciptanya kebersihan kantor dan terpenuhi jasa administrasi perkantoran	12 bulan	4.641.091.64 8,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100	636.206.600, 00
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggar ong	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5 unit	174.667.300, 00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggar ong	Jumlah kendaraan operasional	12 unit	174.682.300, 00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggar ong	Jumlah peralatan dan mesin	167 unit	137.230.000, 00
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggar ong	Jumlah Gedung/bangu nan	12 paket	-
	Pemeliharaan/Rehabili tasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Tenggar ong	Jumlah Gedung/bangu nan	1 paket	149.627.000, 00

	Lainnya				
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	7.299.234.73 4,00
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	5.231.405.33 6,00
	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	kukar	Jumlah LPJU yang dipasang	140 unit	3.234.428.50 0,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perlengkapan jalan yang disediakan	1 paket	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	kukar	Jumlah LPJU dipelihara	700 unit	1.510.000.00 0,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	kukar	Jumlah Rambu, marka dan trafig light	400 m2 dan 208 unit	486.976.836, 00
10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	49.999.000,0 0
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tenggarong	Jumlah terminal yang dipelihara	2 lokasi	49.999.000,0 0

11	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100	200.000.000,00
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Lahan Parkir	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	kukar	Jumlah lokasi parkir	16 Kecamatan	200.000.000,00
12	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	100	599.816.830,00
	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB	4 unit	-
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah lokasi	4 Kecamatan	49.995.000,00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah simcard	10.200 unit	349.912.210,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah alat pengujian	25 unit	199.909.620,00

13	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	1.218.013.568,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah lokasi	15 kecamatan	250.000.000,00
	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	kukar	Jumlah rambu yang dipasang	150 unit	417.268.768,00
	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah lokasi	10 kecamatan	200.000.000,00
	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	kukar	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	350.744.800,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	848.511.847,00
14	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	200.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan	kukar	Jumlah tempat usaha	6 kecamatan	200.000.000,00

	Kabupaten/kota				
15	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	349.987.820,00
	Pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal	Desa Sepatin Kec. Anggana dan Desa Saliki Kec. Ma.Badakk	Jumlah Dermaga	2 unit	349.987.820,00
16	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	298.524.027,00
	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau		Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	1 Unit	-
	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Kec. Ma. Muntai dan Kec. Kembang Jangut	Jumlah pelabuhan/dermaga	2 paket	199.359.027,00
	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	kukar	Jumlah lokasi	6 kecamatan	99.165.000,00
	Jumlah				38.531.578.050,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Pada Tahun 2019 telah dilakukan Review Renstra yang menghasilkan Perubahan Sasaran Strategis dan Indikatornya, maka pada tahun 2021 terjadi perubahan pada sasaran strategis dan indikator dalam melakukan penilaian dan penyusunan pelaporan, Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021, maka dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2021

No.	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Untuk mengetahui Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021, maka dibuatlah daftar perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>					
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1 Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80	74,44	93%	Belum mencapai target Nilai LKjIP 2020
	2 Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
	3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78,53	102%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>					
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>					
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1 Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	100%	105%	105%	Tercapai melebihi target
	2 Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	100%	61%	61%	Belum mencapai target

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 dan 2021

Untuk mengetahui Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 dan 2021, maka dibuatlah data perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun		
			2019		
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
<u>Sasaran sesuai RPJMD</u>					
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1	1) Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	75,0%	93,8%	125%
<u>Sasaran 1 (Renstra)</u>					
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	1	Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	83%	93,8%	113%
	2	Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	79%	94,5%	120%
<u>Sasaran 2 (Renstra)</u>					
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan	77%	94%	123%
	2	Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji	100%	129%	129%
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (Sangat Baik)	77,73 (Baik)	94%
	4	Nilai Akuntabilitas (LKjIP)	77 (BB)	67,10 (B)	86%
	5	Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan	100%	89%	89%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2020			
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>						
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	90%	94%	104%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	78	67,10	86%	Belum mencapai target Nilai LKjIP 2019
	2	Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	76%	85%	112%	Tercapai melebihi target
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	77,73	102%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	88%	89%	101%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>						
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1	Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	85%	89%	105%	Tercapai melebihi target
	2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	99%	90%	91%	Belum mencapai target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>						
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>						
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80	74,44	93%	Belum mencapai target Nilai LKJIP 2020
	2	Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78,53	102%	Tercapai melebihi target
<u>Sasaran 2 Renstra:</u>						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 3 Renstra:</u>						
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1	Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	100%	105%	105%	Tercapai melebihi target
	2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	100%	61%	61%	Belum mencapai target

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan

organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dikarenakan adanya Review Renstra Dinas Perhubungan yang melakukan perombakan di dalam Sasaran Strategis dan Indikatornya maka untuk melakukan analisis perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak berurutan sarasannya akan tetapi disesuaikan dengan indikatornya.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dan capaian output dan outcome yang dihasilkan, berikut analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong tercapai atau tidaknya suatu target sasaran.

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD

Sasaran sesuai RPJMD “**Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan**” mempunyai indikator kinerja sasaran, yaitu: Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD). Adapun capaian kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Indikator sesuai RPJMD: “Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada kondisi sebelumnya untuk tahun 2020 telah terealisasi sebesar 94% dan pada tahun 2021 pada BAB 5 Dokumen RPJMD 2016-2021 ditargetkan tercapai sebesar 100%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 realisasi kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%, ini berarti pada tahun 2021 terjadi

peningkatan kinerja, namun sebenarnya target kinerja tahun 2021 tersebut telah tercapai melebihi target pada tahun 2020. pada tahun 2021 target dari RPJMD adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki fasilitas perhubungan yang layak} \times 100\%}{\text{jumlah seluruh Kecamatan}}$$

(Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target indikator kinerja tahun 2021 sebesar 100% dicapai dengan realisasi kinerja sebesar 100%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100% atau $(100\%/100\% \times 100\% = 100\%)$. Capaian indikatornya yaitu “Cakupan aksesibilitas antar wilayah” memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 1 mendapat interpretasi “**Sangat Memuaskan**”.

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra

Sasaran 1 (Renstra) “**Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan**” mempunyai 3 (**Tiga**) indikator kinerja sasaran, yaitu: 1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan; 2) Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan; 3) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Indikator 1: “Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 adalah **67,10(B)**. Kemudian pada tahun 2020 nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja nilai **74,44 (BB)**.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah merupakan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada setiap tahunnya dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 adalah menunggu hasil penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2021 sekarang ini, namun dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan telah ditetapkan target capaian kinerja untuk nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 adalah **80 (A)**.

Adapun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi AKIP tahun 2014 dengan nilai **68,60** dengan kategori **B** (Baik, perlu sedikit perbaikan);
- 2) Hasil evaluasi AKIP tahun 2015 dengan nilai **75,15** dengan kategori **BB** (Sangat Baik);
- 3) Hasil evaluasi AKIP tahun 2016 dengan nilai **76,78** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)
- 4) Hasil evaluasi AKIP tahun 2017 dengan nilai **77,83** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)
- 5) Hasil evaluasi AKIP tahun 2019 dengan nilai **67,10** dengan kategori **B** (Baik)
- 6) Hasil evaluasi AKIP tahun 2020 dengan nilai **74,44** dengan kategori **BB** (Sangat Baik)

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan dan pada tahun 2019 terjadi penurunan hasil penilaian hal tersebut dipengaruhi karena Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun tersebut melakukan pembenahan baik mulai dari

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi, kemudian pada tahun 2020 ada peningkatan capaian kinerja.

2. **Indikator 2: “Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan”**

a. **Pengukuran Capaian Kinerja**

Untuk indikator 2, yaitu: “Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan”, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada tahun 2021 ditargetkan tercapai sebesar 100%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2021 kondisinya adalah sebesar 100%, ini berarti pada tahun 2021 telah mencapai target capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Prosentase kegiatan yang ada di sasaran 1 Renstra}}{\text{jumlah program yang ada di sasaran Renstra 1}} \times 100\%$$

(Prosentase kegiatan yang ada di sasaran 1 Renstra jumlah program yang ada di sasaran Renstra 1 dikali 100%)

b. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Target indikator kinerja tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi kinerja adalah sebesar 100%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100% atau $(100\% / 100\% \times 100\% = 100\%)$. Capaian indikatornya yaitu “Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan” telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 2 mendapat interpretasi **Sangat Memuaskan**.

3. **Indikator 3: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”**

a. **Pengukuran Capaian Kinerja**

Untuk indikator 3 pada sasaran 2, yaitu: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, untuk tahun 2021 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “77” atau dengan interpretasi “Baik”. Adapun unit pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);

Metode pelaksanaan dan penyusunan hasil survey kepuasan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan tahapan sebagai berikut:

1.3.1. Persiapan Survey

1. Penyiapan Bahan Survey

- a. Kuesioner: sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan, dengan bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam:
 - 1) Bagian Pertama: berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.
 - 2) Bagian Kedua: berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh.
 - 3) Bagian Ketiga: berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.
- b. Bentuk Jawaban: bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

2. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Penetapan Jumlah Responden: Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Adapun jumlah responden yang ditentukan dalam kegiatan survey ini adalah sebanyak 100 (seratur) orang pengguna layanan.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- c. Pelaksanaan Pengumpulan Data: melalui pengisian kuesioner untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Langkah-Langkah Pengolahan Data

1. Pengukuran Skala Likert (Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai)

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Rumus 2:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Rumus 3:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.5

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat baik

Sumber: PERMENPAN-RB Nomor 14 tahun 2017

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk indicator 3, yaitu: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada kondisi sebelumnya di tahun 2020 adalah 77.73%, dengan interpretasi “Baik”. Kemudian guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat (pengguna jasa layanan) Dinas Perhubungan tahun 2021, telah dilakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai IKM Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Tabel 3.6

Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Bobot nilai rata-rata tertimbang	
1	Persyaratan	3.22	0.111	0.35
2	Prosedur	3.15	0.111	0.34
3	Waktu pelayanan	2.90	0.111	0.32
4	Biaya/ tarif	2.93	0.111	0.33
5	Produk layanan	3.15	0.111	0.34
6	Kompetensi pelaksana	3.18	0.111	0.35
7	Perilaku pelaksana	3.16	0.111	0.35

8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	2.98	0.111	0.33
9	Sarana dan prasarana	3.63	0.111	0.40
Nilai Indeks				3.14
Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (25)				78.53
Mutu pelayanan				B
Kinerja layanan =				BAIK
Ket: Nilai Interval Konversi IKM = (76,61 - 88,30) = BAIK (B)				

Sumber: Hasil analisis data

Indeks Kepuasan Masyarakat Dishub_Kukar @ 2021

- 2) Nilai Rata-Rata IKM Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan nilai IKM pada setiap unit pelayanan di atas, guna menentukan nilai IKM terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan, maka diketahui melalui rata-rata nilai IKM sebagai berikut:

Tabel 3.7
Nilai Rata-Rata IKM Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu	Kinerja
1	Persyaratan	3.22	B	Baik
2	Prosedur	3.15	B	Baik
3	Waktu pelayanan	2.90	C	Kurang Baik
4	Biaya/ tarif	2.93	C	Kurang Baik
5	Produk layanan	3.15	B	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.18	B	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.16	B	Baik
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	2.95	C	Kurang Baik
9	Sarana dan prasarana	3.63	A	Sangat Baik
Rata-Rata Nilai Per Unsur Pelayanan		3.14	B	Baik

Sumber: Hasil analisis data

Indeks Kepuasan Masyarakat Dishub_Kukar @ 2021

Berdasarkan hasil analisis data kepuasan masyarakat pada tabel 3.7 di atas, telah diperoleh nilai indeks sebesar 3,14 yang kemudian dikali dengan nilai dasar yaitu 25 maka diperoleh nilai IKM yaitu sebesar 78,53. Dengan demikian

berdasarkan pedoman penilaian pada tabel 3.5 diketahui bahwa nilai IKM berada pada nilai interval konversi=76,61-88,30, maka dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan mendapat nilai “**B**” dengan kinerja pelayanan pada kategori “**Baik**”.

Kemudian berdasarkan nilai indeks pada setiap unsur pelayanan diketahui bahwa dari 9 unsur layanan terdapat 3 unsur dengan mutu layanan memperoleh nilai “**C**” atau memiliki kinerja “**Kurang Baik**”, yaitu pada unsur layanan nomor: 3 (Waktu pelayanan), 4 (Biaya/ tarif), 5 (Produk layanan), dan 8 (Penanganan pengaduan, saran, dan masukan). Data tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian atau beberapa orang masyarakat pengguna layanan dari 100 orang sebagai responden mempunyai persepsi kurang puas terhadap beberapa unsur pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra

Sasaran 2 Renstra “**Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan**” mempunyai **1 (satu)** indikator kinerja sasaran, yaitu:

- 1) Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan

Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Indikator 1: “Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk indikator 1 pada sasaran 2 Renstra, yaitu: “Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan”, bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada kondisi sebelumnya yaitu indikator prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai di tahun 2019 adalah 69%, kemudian pada tahun 2020 ditargetkan capaian kinerja sebesar 88 %, dan pada tahun 2021 indikator dirubah menjadi prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan target 100 %

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Kecamatan yang memiliki sapras, fas perhubungan yang layak} \times 100\%$$

jumlah seluruh Kecamatan

(Jumlah Kecatan yang memiliki sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target indikator kinerja tahun 2021 sebesar 100% telah dicapai sesuai target kinerja, yaitu sebesar 100%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100% atau $(100\%/100\% \times 100\% = 100\%)$. Capaian indikatornya yaitu “Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan” telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 1 pada Sasaran 2 adalah mendapat interpretasi “**Sangat Memuaskan**”.

3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Renstra

Sasaran 3 Renstra “**Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan**” mempunyai **2 (dua)** indikator kinerja sasaran, yaitu: 1) Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan ; 2) Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji.

1. Indikator 1 : “Prosentase Penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan”

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk indicator ke 1 pada sasaran 3 Renstra, yaitu: “Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan” dilakukan dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi}}{\text{jumlah target pendapatan}} \times 100\%$$

(Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi dibagi jumlah target pendapatan dikali 100%)

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Target kinerja pada tahun 2021 ditargetkan penerimaan retribusi sebesar Rp. **890.647.300,-** dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja,

diketahui bahwa jumlah penerimaan retribusi sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp. **936.109.203,-** dengan demikian capaian kinerja terealisasi melebihi target, yaitu mencapai 105%, maka besarnya prosentase capaian kinerja adalah sebesar 105%. Capaian indikatornya yaitu “*Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan*” tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara lebih rinci mengenai realisasi penerimaan retribusi sector perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Rincian Pendapatan Retribusi Sektor Perhubungan Tahun 2021

No.	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	180.000.000	125.385.000	70%
2	Retribusi Pemakaian Kekayan daerah Kendaraan Bermotor	0	3.750.000	0%
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	554.007.300	460.691.203	83%
4	Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha (Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha)	6.000.000	13.185.000	220%
5	Retribusi Pelayanan Khusus Parkir	10.000.000	12.558.000	126%
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.640.000	51.840.000	169%
7	Retribusi pelayanan kepelabuhanan	110.000.000	268.700.000	244%
Jumlah		890.647.300	936.109.203	105%

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021 Dinas Perhubungan

2. **Indikator 2: “Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji”**

a. **Pengukuran Capaian Kinerja**

Kendaraan angkutan umum yang laik jalan adalah kendaraan yang telah lulus uji kendaraan bermotor yang dilakukan di Balai Pengujian kendaraan bermotor (PKB). Pengujian kendaraan bermotor meliputi: pengujian casis kendaraan, kaki-kaki, sistem pengereman, sistem kelistrikan, lampu-lampu dan sebagainya.

Khusus untuk kendaraan angkutan umum diwajibkan untuk melakukan pengujian kendaraan/ KIR sebanyak 2 kali dalam setahun (per enam bulan), bagi kendaraan yang telah melewati serangkaian pengujian kendaraan bermotor dan dinyatakan lulus, maka akan diberikan Kartu Lulus Uji (Smart Card) Penganti dari Buku Uji KIR, Sertifikasi Lulus Uji dan tanda uji berupa stiker untuk didepan kaca yang menandakan bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji. Dengan semakin meningkatnya kendaraan angkutan umum yang teruji, maka akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator ke 2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji)}}{\text{jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$$

(Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100%)

b. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Target capaian kinerja pada indikator ini tahun 2021 adalah sebesar 100% dan setelah evaluasi telah terealisasi sebesar 61%, maka besarnya capaian kinerja adalah belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikatornya yaitu “*Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji*” belum mencapai dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 2 mendapat interpretasi “**belum Memuaskan**”.

Pengukuran capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2021 ditetapkan target kinerja sebesar 100% atau sebanyak 13.500 unit kendaraan yang akan diuji;
- 2) Kemudian capaian/ realisasi kinerja pada tahun 2021 mencapai 61%, yaitu sebanyak 8.202 unit kendaraan yang telah diuji, dengan demikian realisasi kinerja belum memenuhi target kinerja.

Adapun secara umum beberapa faktor yang menyebabkan ketidaklulusan uji kendaraan angkutan umum, yaitu:

- 1) Adanya gangguan pada sistem kaki-kaki kendaraan seperti: tie road, sayap, shock breaker, pengereman;
- 2) Ban kendaraan dalam kondisi gundul;
- 3) Kurang berfungsinya sistem kelistrikan, seperti lampu sein tidak menyala, lampu rem mati, lampu jauh mati satu, dan sebagainya.

Kemudian beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya cabang UPT Pengujian di wilayah pantai dan wilayah hulu;
- 2) belum adanya layanan pendaftaran pengujian secara online;
- 3) alat – alat pengujian yang sudah lama dan perlu peremajaan;
- 4) dengan adanya wabah pandemi Covid 19 maka jam pelayanan dari pengujian kendaraan bermotor terbatas;
- 5) belum optimalnya penerapan sistem informasi manajemen pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- 6) belum optimalnya kegiatan razia terhadap kendaraan wajib uji di lingkungan wilayah kutai kartanegara;
- 7) masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kendaraan miliknya;
- 8) masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji Kendaraan Bermotor.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari 3 (tiga) sumber daya yang utama, yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Aset, dan Sumber Daya Keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah semua Karyawan/ Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang berstatus PNS maupun yang berstatus Honorer/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber Daya Aset terdiri dari Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta dokumen-dokumen penunjang yang ada digunakan dan dimanfaatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Sumber Daya Keuangan, yaitu pendanaan yang berasal dari dana APBD Pemerintah Daerah, APBD Provinsi melalui BANKEU yang dianggarkan pada setiap tahunnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 136 orang PNS ditambah dengan tenaga pembantu non PNS/ Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 253 orang termasuk tenaga lapangan seperti di Dermaga dan Terminal di beberapa Kecamatan-Kecamatan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan, SDM yang berperan sangat penting dalam teknis pelaksanaannya, adalah sebagai berikut:

1) Pengguna Anggaran (PA);

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

Kemudian pada Dinas Perhubungan, yang memegang perananan Pengguna Anggaran adalah Pejabat Eselon II, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Untuk pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan, yang diberi kewenangan sebagai KPA adalah Pejabat Eselon III yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yaitu terdiri dari 1 (Satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membidangi Perhubungan Darat, ASDP, Perhubungan Laut, Pengendalian dan Operasional.

3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya yaitu: 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu: menyusun spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membuat rancangan Kontrak; 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 7) membuat dan menandatangani Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 8) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal ini untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2021 di Dinas Perhubungan, telah dimanfaatkan beberapa SDM Aparatur Perhubungan untuk ditetapkan sebagai PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan PPK, yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari para Pejabat Eselon IV (Kasi dan Kasubbag), dan beberapa staf yang memang berkompeten untuk menjadi PPTK.

5) Unit Layanan Pengadaan;

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2021 telah dibentuk organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang masih melekat pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6) Panitia/ Pejabat Pengadaan;

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, yaitu bertugas untuk melaksanakan pengadaa untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7) Pengurus Barang Pengguna ;

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) orang Pegawai yang bertugas sebagai Pengurus Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tabel 3.9
Daftar penggunaan SDM/ Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021

No.	Jabatan	Bidang Tugas	Jumlah	Keterangan
1	Pengguna Anggaran (PA)	Untuk 1 (satu) SKPD	1	Kepala Dinas
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Bidang Sekretariat	5	
		Bidang Perhubungan Darat		
		Bidang ASDP		
		Bidang Perhubungan Laut		
		Bidang Pengendalian dan Operasional		
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		6	1 orang PNS Gol.III untuk Bidang Sekretariat, Seluruh Kepala Bidang menjabat KPA dan merangkap sebagai PPK pada masing-masing

				bidang
4	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Bidang Sekretariat dan Bidang Darat	1	
		Bidang Laut , ASDP,PKB dan Dalops	1	
5	Pengurus Barang Pengguna	Untuk 1 (satu) SKPD	1	

ii. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2021, Dinas Perhubungan memanfaatkan aset diantaranya berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin seperti: Kendaraan dan peralatan kantor, serta peralatan kantor lainnya dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan. Secara lebih jelas nilai sumber daya aset Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2021

No.	Jenis Aset	Target (Rp)	Bobot (%)
1	Piutang Lainnya	-	0,00%
2	Persediaan	1.285.823.070	0,18%
2	Tanah	3.176.929.400	0,44%
3	Peralatan dan Mesin	38.926.215.232	5,37%
4	Gedung dan Bangunan	611.074.874.774	84,35%
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.886.287.492	1,50%
6	Aset Tetap Lainnya	0	0,00%
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	100.346.953.338	13,85%
8	Akumulasi Penyusutan	-70.754.004.822	-9,77%
9	Aset Tidak Berwujud	26.987.908.770	3,73%
10	Aset Lain-lain	2.516.900.035	0,35%
Jumlah		724.447.887.288	100%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Kukar Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai aset terbesar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada kategori jenis aset: "Gedung dan Bangunan", yaitu dengan prosentase sebesar 84,35% dari total keseluruhan aset, dan selanjutnya adalah aset "Kontruksi Dalam Pengerjaan" dengan prosentase sebesar 13,85%.

iii. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2021 adalah menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 baik APBD murni maupun APBD Perubahan dan Bantuan keuangan Propinsi yang jumlah anggarannya secara keseluruhan adalah Rp. 59.044.643.216,- (Termasuk Belanja Tidak Langsung/Gaji, tunjangan, dll), kemudian terealisasi sebesar Rp. 55.775.594.436,- atau sebesar 94,46%. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.655.012.907,-. Adapun jumlah anggaran keseluruhan tersebut adalah untuk membiayai 3 Program dengan 16 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, serta termasuk untuk pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS.

b. Realisasi Anggaran SKPD

Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2021 adalah menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 baik APBD murni maupun APBD Perubahan dan Bantuan keuangan Propinsi (Bankeu) yang jumlah anggarannya secara keseluruhan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 59.044.643.216,- Adapun penggunaan anggaran adalah untuk membiayai 3 Program dengan 16 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, serta termasuk untuk pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS.

Rincin alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi (pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS dan Belanja Barang dan Jasa)	34.538.254.429,00	31.711.590.099	91,82%

2	Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Lainnya)	24.506.388.787,00	24.064.004.337	98,19%
Jumlah		59.044.643.216,00	55.775.594.436	94,46%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas perhubungan Kab.Kukar TA.2021

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2021

No	Program	Realisasi Anggaran TA.2020			Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.487.896.137	27.872.674.605	91,42%	2.615.221.532
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.600.811.555	9.401.625.645	97,93%	199.185.910
3	Program Pengelolaan Pelayaran	18.955.935.524	18.501.294.186	97,60%	454.641.338
Jumlah Pagu Program		59.044.643.216	55.775.594.436	94,46%	3.269.048.780

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kab.Kukar TA.2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran adalah sebesar 94,46%. Secara lebih rinci mengenai realisasi anggaran (pagu dana) yang digunakan dan yang telah digunakan (realisasi) untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kerja tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2021			Program	Realisasi Anggaran TA.2020			Sisa Anggaran (Rp)	
			Target Kinerja	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>											
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	100%	100%	100%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.487.896.137	27.872.674.605	91,42%	2.615.221.532
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>											
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80	74,44	93%	3	Program Pengelolaan Pelayanan	18.955.935.524	18.501.294.186	97,60%	454.641.338
	2	Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	100%	100%	100%	Jumlah Pagu Program Indikator 1 s.d 3 Sasaran Renstra		59.044.643.216	55.775.594.436	94,46%	3.269.048.780

	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78,53	102%
<u>Sasaran 2</u>					
<u>Renstra:</u>					
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	100%	100%
<u>Sasaran 3</u>					
<u>Renstra:</u>					
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1	Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	100%	105%	105%
	2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	100%	61%	61%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan penggunaan anggaran terhadap target Indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran sesuai Bab 5 RPJMD “Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan”

Tingkat ketercapaian sasaran sesuai RPJMD Kab.Kukar tahun 2016-2021 ini diukur dengan indikator: “*Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)*”. Pada tahun 2021 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) program, yaitu: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.811.555,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.401.625.645,- atau dengan prosentase sebesar 97,93%. Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 100%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 100% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

2. Sasaran 1 Renstra “Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan”

Tingkat ketercapaian sasaran 1 Renstra ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- a. ***Indikator 1: Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan***
- b. ***Indikator 2: Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan***
- c. ***Indikator 3: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***

Penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja pada sasaran 1 Renstra ini adalah dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 30.487.896.137,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.872.674.605,- atau dengan capaian prosentase sebesar 91,42%. Bahwa dengan prosentase realisasi anggaran tersebut, telah menghasilkan kinerja, yaitu: 1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dengan nilai 74,44(BAIK); 2) Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan sebesar 100% dan 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 78,53 (BAIK).

2. Sasaran 2 Renstra “Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan”

Tingkat ketercapaian sasaran 2 Renstra ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

- a. ***Indikator 1: Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan.*** Pada tahun 2021 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui “Program Pengelolaan Pelayaran” dengan anggaran sebesar Rp. 18.955.935.524,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.501.294.186,- atau dengan prosentase 97,60%. Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 100%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 97,60%, Dinas Perhubungan dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 100%;

3. Sasaran 3 Renstra “Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan”

Tingkat ketercapaian sasaran 3 Renstra ini diukur dengan 2 (Dua) indikator kinerja, yaitu:

- a. ***Indikator 1: Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan***

- b. ***Indikator 2: Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji .***

Pada tahun 2021 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.811.555,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.401.625.645,- atau dengan prosentase sebesar 97,93%. Bahwa dengan prosentase realisasi anggaran tersebut, telah menghasilkan capaian kinerja 1) Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan 105% dan 2) Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji 61%

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Keberhasilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan pada perencanaan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 7 indikator kinerja sebesar 94%. Dari 7 indikator sasaran, hanya terdapat 2 indikator yang capaian kerjanya belum mencapai target. Secara lebih jelas capaian kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Sasaran sesuai RPJMD:</u>					
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1 Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
<u>Sasaran 1 Renstra:</u>					
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80	74,44	93%	Belum mencapai target Nilai LKjIP 2020
	2 Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
	3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78,53	102%	Tercapai melebihi target

Sasaran 2 Renstra:						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
Sasaran 3 Renstra:						
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1	Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan	100%	105%	105%	Tercapai melebihi target
	2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji	100%	61%	61%	Belum mencapai target
Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran					94%	

4.2. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu pada Sasaran sesuai RPJMD. Sasaran Renstra 1, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target kinerja dan Sasaran Renstra 3 ada 1 Indikator yang belum mencapai target kinerja, yaitu:

1. Sasaran 1 Renstra yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dengan prosentase capaian kinerja 93 %
2. Sasaran 3 Renstra: pada indikator nomor 2, yaitu Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji dengan prosentase capaian kinerja sebesar 61%.

Belum tercapainya target capaian kinerja adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

Sasaran Renstra 1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Renstra Belum dipublikasikan;
 - b. Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja belum disampaikan dalam bentuk yang smart/terukur;
 - c. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
 - d. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Esselon II, III, IV dan Staf belum dikaitkan dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;
 - e. Laporan target kinerja belum bisa dimonitor pencapaiannya;
 - f. Laporan kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome/informasi kinerja yang lebih handal;
- Sasaran Renstra 3 Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji sebagai berikut :
- a. Belum adanya cabang UPT Pengujian di wilayah pantai dan wilayah hulu;
 - b. belum adanya layanan pendaftaran pengujian secara online;
 - c. alat – alat pengujian yang sudah lama dan perlu peremajaan;
 - d. dengan adanya wabah pandemi Covid 19 maka jam pelayanan dari pengujian kendaraan bermotor terbatas;
 - e. belum optimal nya penerapan sistem informasi manajemen pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. belum optimal nya kegiatan razia terhadap kendaraan wajib uji di lingkungan wilayah kutai kartanegara;
 - g. masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kendaraan miliknya;
 - h. masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji Kendaraan Bermotor.

4.3. Langkah-Langkah di Masa Mendatang

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berupaya untuk dapat mencapai semua target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) walaupun sebagian besar sudah tercapai bahkan melebihi dari

target yang ditetapkan. Mengingat masih ada 2 indikator yang belum mencapai target, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan harus menyiapkan strategi dan langkah-langkah perbaikan. Guna lebih meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, ada banyak langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

- a. Terus memperkuat sistem perencanaan program kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, serta dokumen perencanaan daerah yang mendasari penyelenggaraan pembangunan di bidang perhubungan agar lebih mendasari dan memberikan kejelasan dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Memanfaatkan dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-studi yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas lalu lintas jalan maupun sungai dan laut;
- c. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang sudah ada di beberapa Kecamatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
- d. Terus berupaya mengoptimalkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
- e. Meningkatkan kemanfaatan fasilitas lalu lintas yang sudah ada guna kelancaran akses transportasi di semua wilayah Kabupaten serta mendukung perkembangan sektor pariwisata;
- f. Mengoptimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan kelayakan angkutan umum darat yang akan berdampak untuk meminimalisir kejadian kecelakaan serta mencegah pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;

- g. Mengoptimalkan koordinasi dengan Instansi Terkait terutama dengan pihak Kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
- h. Berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim terkait dengan penanganan masalah kecelakaan, ketersediaan rambu-rambu keselamatan lalu lintas pada jalan Provinsi yang berada di Wilayah Kabupaten;
- i. Berupaya meningkatkan kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi atau Aplikasi serta Website Dinas Perhubungan untuk memajemen pengelolaan data dan informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat maupun Instansi terkait;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Intansi terkait baik dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan kinerja perencanaan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- l. Melakukan manajemen SDM guna terpenuhinya Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan;
- m. Berupaya untuk lebih meningkatkan kompetensi para Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Diklat, Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik;
- n. Kepala Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan kebijakan serta perencanaan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan

nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan, agar kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dibuat, semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mendukung mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat kutai kartanegara yang sejahtera dan bahagia.

Tenggarong, 22 Pebruari 2021

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ahmad Junaidi, S.Pd.,MM

Pembina TK.I

NIP. 19720224 199203 1 006